BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Prastowo (2012:40) menyatakan bahwa:

> "Kegiatan ini (penyusunan kajian pustaka) bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan".

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:101) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

> "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah".

Menurut Ahmad Yani (2015:51) juga menyebutkan bahwa:

> "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sedangkan menurut Muhammad Fauzan (2006:235) yakni:

> "Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah".

Berdasarkan ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang dipungut dari

dalam wilayahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berasal dari sumber ekonomi asli daerahnya.

2.1.1.2 Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sejalan dengan Erlina dan Rasdianto (2013:93) yang menjelaskan kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

1. "Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah".

Diatas diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Maka dari itu dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur pendapatan asli daerah adalah Total Pendapatan Asli Daerah (Total PAD).

2.1.2 Belanja Modal

2.1.2.1 Definisi Belanja Modal

Belanja Modal menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:107) adalah:

> "Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi".

Menurut Bachtiar Arif (2009:188) menyatakan bahwa:

> "Belanja modal merupakan belanja yang tidak habis satu tahun dan menghasilkan aset tetap pemerintah".

Sedangkan menurut Dedi Nordiawan (2010:50) yakni:

> "Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah asset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran oprasional untuk biaya pemeliharaan".

Dari ketiga pengertian diatas diketahui bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang meberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan pemerintahan untuk biaya pemeliharaan.

2.1.2.2 Indikator Belanja Modal

Sejalan dengan Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:107) bahwa belanja modal di kelompokkan berdasarkan:

1. "Belanja tanah.
2. Belanja peralatan dan mesin.
3. Belanja modal gedung dan bangunan.
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.
5. Belanja aset tetap lainnya".

Berdasarkan penjelasan diatas, maka indikator belanja modal yang akan diukur dalam penelitian ini adalah Total Belanja Modal.

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Definisi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Wibowo (2014:7) kinerja yaitu:

> "Kinerja berasal dari pengertian *performance.* Ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja".

Kinerja keuangan menurut Fahmi (2012:2) adalah:

> "Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan atau organisasi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan banar".

Sedangkan menurut Rudianto (2013:189) kinerja keuangan merupakan:

> "Hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan".

Kinerja keuangan pemerintah daerah menurut Abdul Halim (2008:24) yakni:

> "Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah".

Kinerja keuangan pemerintah daerah menurut Sucipto (2011:36) didefiniskan sebagai berikut:

> "Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang- undangan selama satu periode anggaran".

Dari ketiga pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah ukuran untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dengan mengacu pada kebijakan dan ketentuan perundang-undangan.

2.1.3.2 Indikator Kinerja Keuangan

Menurut Mahmudi (2011:170) menyatakan bahwa:

"Setiap pemerintah daerah untuk mengukur kinerja keuangan daerahnya menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Dearah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian.

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.
Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2011:170)

Keterangan:
DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t
TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2011:170)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan Daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

c. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2011:170)

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohamad Mahsun (2012:187) adalah:

1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti tidak efektif.
2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti efektivitas berimbang.
3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti efektif.

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun Pemerintah Daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk

merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$REKD = \frac{\text{Total realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2011:171)

Tabel 2.1
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mohamad Mahsun (2012:187)

e. Rasio Keserasian

Dengan Rasio Keserasian memberikan kita gambaran bagaimana memberikan prioritas belanja daerah pada alokasi dana. Rasio Keserasian itu dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2011:171)

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Keserasian dalam belanja daerah terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah".

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan Rasio Efisiensi untuk menghitung kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja Belanja Modal di Kota Bandung.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2011:6) menyebutkan bahwa:

> "Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan yang realisasinya lebih besar dari target anggaran menunjukkan kemampuan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihitung menggunakan rasio efisiensi, menggambarkan bahwa semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik".

Menurut Sri Mulyani (2017:63) menyebutkan bahwa:

> "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Hal tersebut menunjukan, semakin besar PAD maka akan semakin tinggi kinerja keuangan yang diukur dari rasio efisiensi. Rasio efisiensi yang semakin tinggi mangidentifikasikan kinerja yang buruk".

Penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh pendapatan asli daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Mulia Andirfa (2016) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fisa Aprilia (2016) yang menunjukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian Budianto dan Stanly (2016) yang menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian Suprianto (2013) juga menyimpulkan secara umum PAD memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dan penelitian dari Ebit, dkk (2012) yang menyebutkan pula bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.2.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim (2008:336) menyebutkan bahwa:

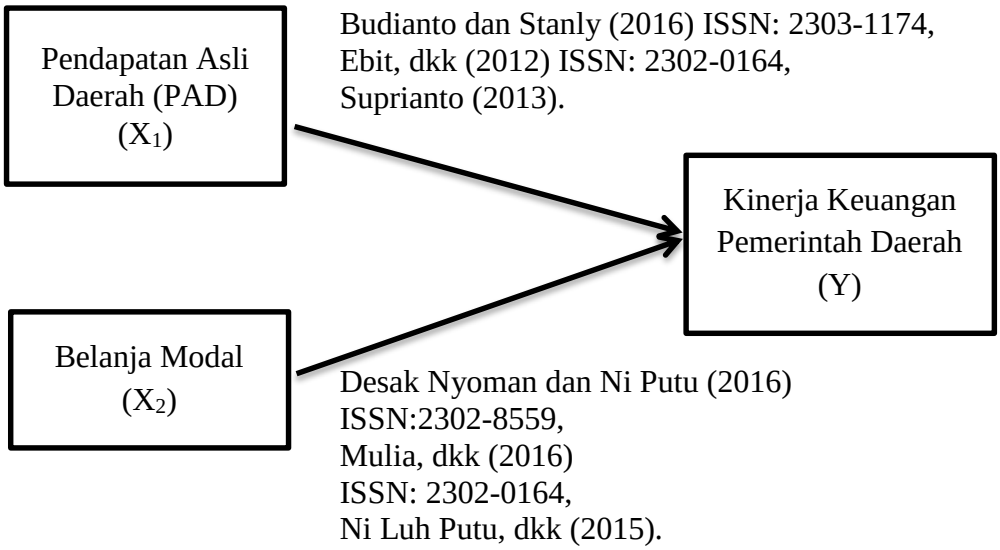
> "Keputusan yang diambil oleh Pemeritah untuk lebih besar mengalokasikan dana dalam rangka membiayai kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang disebut belanja modal, menandakan bahwa Pemerintah telah mengelola keuangan Daerah dengan baik".

Menurut Sri Mulyani (2017:62) menyebutkan bahwa:

> "Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Sehingga semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja daerah akan lebih baik. Hal tersebut menunjukan, semakin tinggi belanja modal maka akan semakin tinggi kinerja keuangan yang diukur dari rasio efisiensi. Rasio efisiensi yang semakin tinggi mangidentifikasikan kinerja yang buruk".

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Mulia Andirfa (2016) yang menunjukan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fisa Aprilia (2016) yang menunjukan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian Desak Nyoman dan Ni Putu (2016) yang menyebutkan bahwa belanja modal berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan penelitian Ni Luh Putu, dkk (2015) menyatakan bahwa hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa belanja modal secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan kinerja keuangan. Penelitian yang di lakukan oleh Mulia, dkk (2016) juga, berdasarkan hasil perhitungannya menunjukkan bahwa secara parsial variabel BM (Belanja Modal) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

2.2.3 Paradigma Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:99) menyatakan definisi hipotesis adalah:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Menurut Moh. Nazir (2014:132) menyatakan bahwa:

"Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi".

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H_2: Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.